



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026**" telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi Kecamatan Prambon untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prambon ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 17 September 2021
**Pit. CAMAT PRAMBON
KABUPATEN SIDOARJO**

FERI PRASETIYA BUDI, S.STP, M.HP
Pembina
NIP. 19790208 199810 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah	I-1
1.1.2 Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.....	I-2
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD.....	I-2
1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga(K/L), Resntra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) PD.....	I-4
1.2 Landasan Hukum.....	I-7
1.3 Maksud Dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRAMBON.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Prambon .	II-1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Prambon.....	II-3
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo .	II-19
2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon	II-19
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.....	II-24
2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra Kementerian .	II-24
2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW	II-25
2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen KLHS.....	II-27



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Prambon.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam negeri dan Renstra Provinsi Jawa Timur	III-7
3.4 Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-10
3.5 Penentu Isu-Isu Strategis	III-12
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.....	V-1
5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.VI-1	
6.1 Rencana Program	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 ASN dan Non ASN	II-8
Tabel 2.2 Sebaran PNS Berdasarkan Umur	II-8
Tabel 2.3 Sebaran PNS Berdasarkan Pendidikan	II-9
Tabel 2.4 Sebaran PNS Berdasarkan Golongan	II-10
Tabel 2.5 Sebaran PNS Berdasarkan Eselon.....	II-10
Tabel 2.6 Kebutuhan Pegawai dan Eksisting Pegawai Kecamatan Prambon ..	II-11
Tabel 2.7 Peralatan dan Mesin	II-19
Tabel 2.8 Hasil Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020.....	II-21
Tabel 2.9 Hasil Realisasi Anggaran Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2020.....	II-22
Tabel 2.10 Comparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Prambon terhadap Sasaran Renstra K/L.....	II-24
Tabel 2.11 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Prambon.....	II-26
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-5
Tabel 3.3 Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian.....	III-8
Tabel 3.5 Penentu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	III-11
Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis	III-13
Tabel 3.7 Total Skor Isu-Isu Strategis	III-13



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-3
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.....	VI-5
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan	I-3
Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD	I-4
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah	I-5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Prambon.....	II-2
Gambar 2.2 Persentase Sebaran Berdasarkan Usia	II-7
Gambar 2.3 Persentase Sebaran Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-8



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan didalam perencanaan pembangunan. Pada perencanaan strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Implementasi perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara spesifik perencanaan strategis diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 permendagri 86 tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.



1.1.2 Fungsi Renstra PD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil.

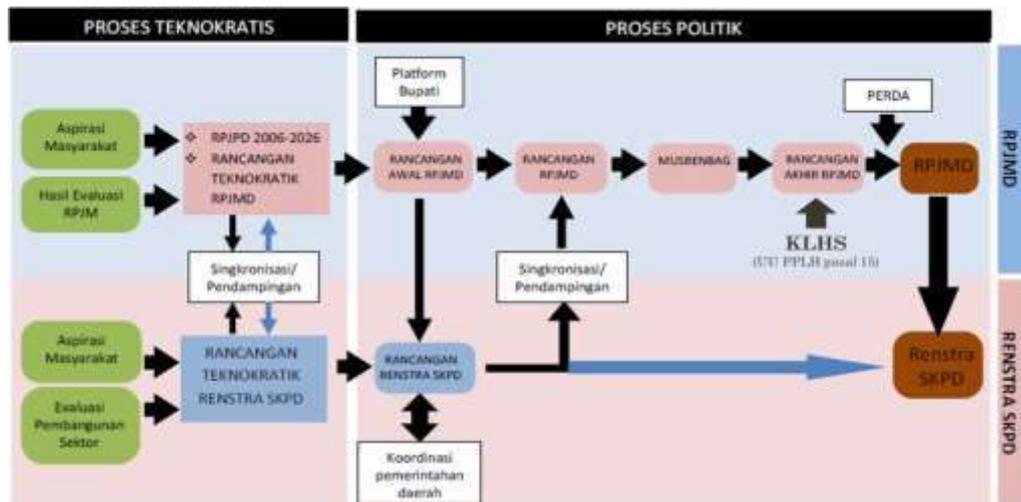
Dengan demikian fungsi Renstra PD adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD

Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Prambon Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Sidorjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD sebab keduanya memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.



RANCANGAN AKHIR KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

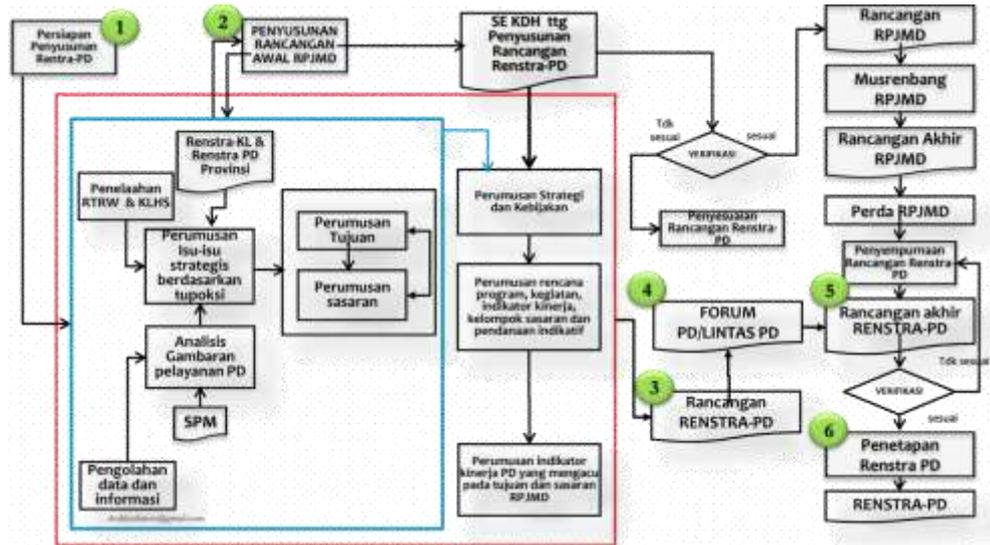


Gambar 1.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan

Rancangan akhir Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Prambon. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Kecamatan Prambon untuk melengkapi rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra Kecamatan Prambon menjadi Renstra Kecamatan Prambon. Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Camat harus sinkron dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.



RANCANGAN AKHIR KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Gambar 1.2

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Kecamatan Prambon berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan

1.1.4 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) PD

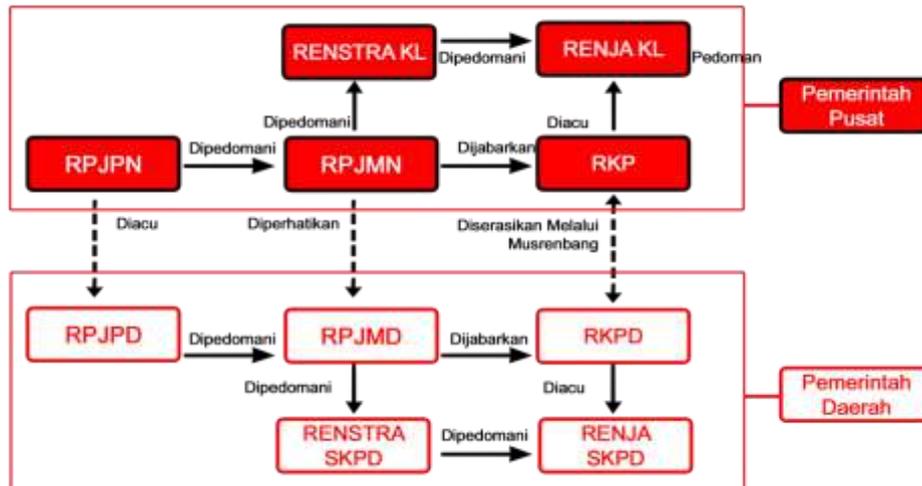
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi: Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



Gambar 1.3

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

Renstra Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Kecamatan Prambon dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo yaitu pada pelayanan yang ada setiap bidang pelayanan yang saat ini berdedikasi pada sistem aplikasi pada pelayanan yang memudahkan agar tercapainya efektifitas, efisiensi, transparansi dan responsifitas.



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Prambon Tahun 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Membantu dalam sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
- d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-PD Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar pada sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Prambon
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian
- 3.4 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Prambon
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Prambon dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

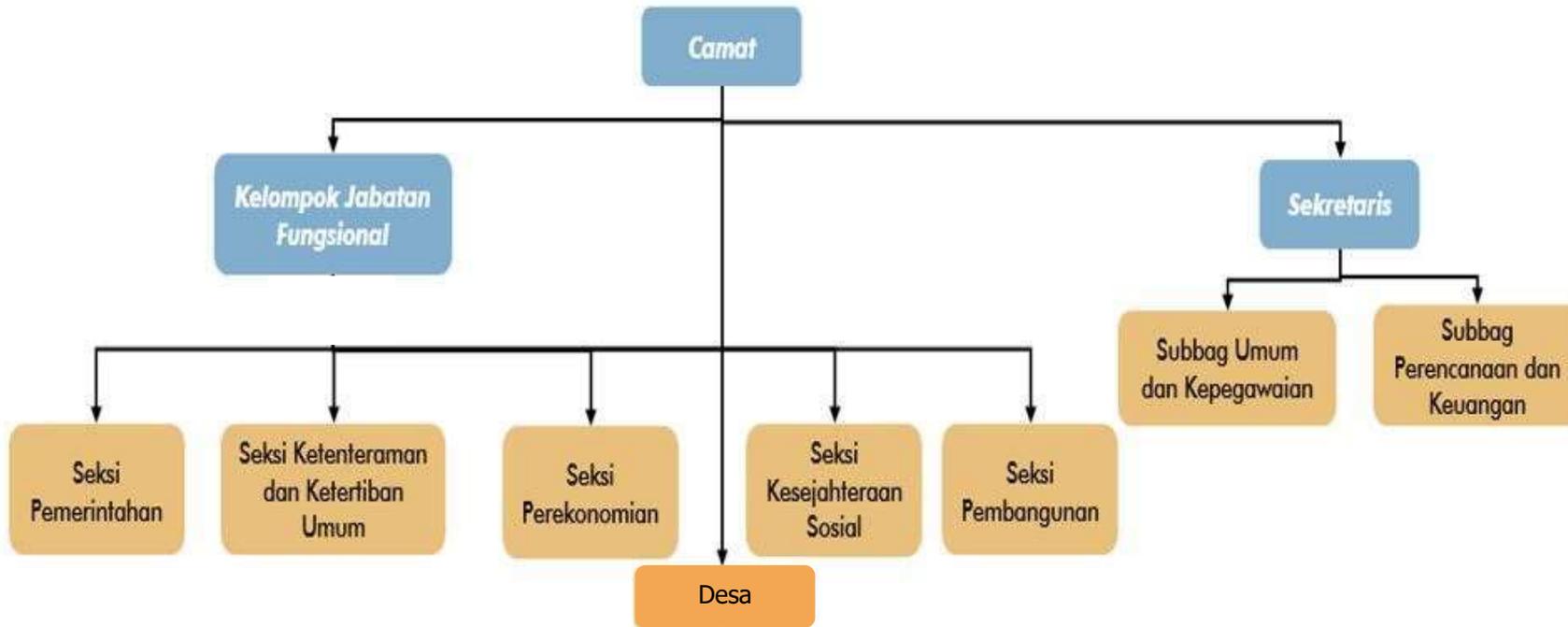
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PRAMBON

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PRAMBON

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Dipimpin oleh seorang Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya

Untuk dapat menjalankan fungsi yang telah ditetapkan, Kecamatan Prambon memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Prambon



2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PRAMBON

Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. Camat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Camat berwenang menandatangani:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
- c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:



- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c. menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- b. mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
- d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 2. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;



3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:
 1. pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 3. pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar);
 4. penanganan konflik sosial;
- c. memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;



- b. pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 1. pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 2. pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 1. pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 2. pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.



7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 1. pembinaan penanganan sampah domestik;
 2. pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi).
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan modal penting yang menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun



mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Total terdapat 31 orang PNS di Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dan pegawai Non PNS sebanyak 13 orang

Tabel 2.1
Berdasarkan ASN dan Non ASN

URAIAN	TOTAL
ASN	31
NON ASN	13
TOTAL	44

Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

Dengan total keterangan ASN dan Non ASN tersebut tentunya tidak lepas dengan berdasarkan umur dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.2
Berdasarkan Umur

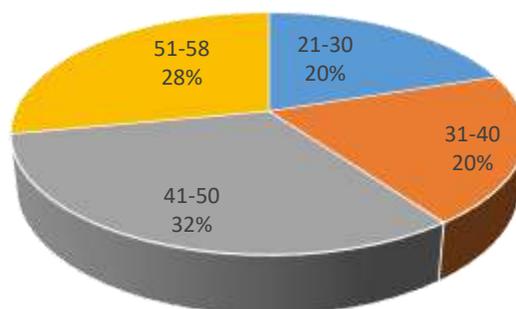
UMUR	TOTAL	PERSENTASE
21-30	9	20%
31-40	9	20%
41-50	14	32%
51-58	12	28%
TOTAL	44	100%

Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

Dengan tabel diatas bahwa pada umur 21-30 Tahun berjumlah 9 orang, 31-40 Tahun berjumlah 9 orang, 41-50 Tahun berjumlah 14 orang, 51-58 Tahun berjumlah 12 orang. Maka pada umur 51-58 Tahun merupakan umur dengan persentase terbanyak yaitu 32% bahwa perlu adanya pegawai baru dengan umur produktif serta tenaga ahli dalam pelayanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kinerja serta realisasi target kinerja yang telah ditetapkan.



Usia Pegawai



Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

Gambar 2.2
Persentase Berdasarkan Umur

Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Prambon juga didukung dengan adanya tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

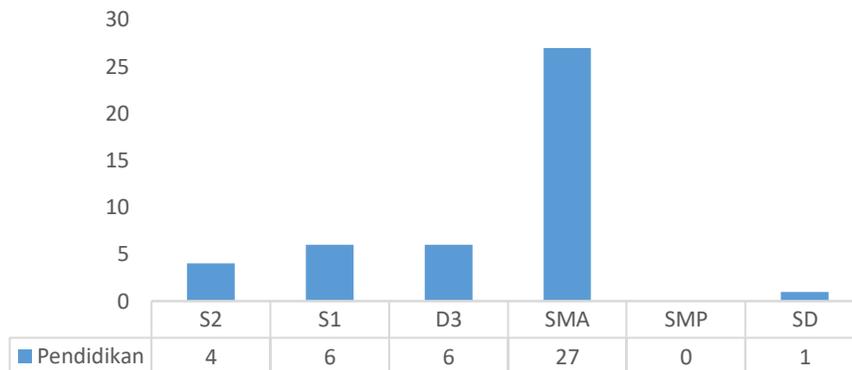
PENDIDIKAN	TOTAL	PERSENTASE
S2	4	9%
S1	6	14%
D3	6	14%
SMA	27	61%
SMP	0	0%
SD	1	2%
TOTAL	44	100%

Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa terdapat tingkat pendidikan di Prambon yaitu SMP sebanyak 0 orang, SMA sebanyak 27 orang, D3 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 6 orang, S2 sebanyak 4 orang. Dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu SMA dengan persentase 61%. Keterangan persentase sebagai berikut:



Pendidikan



Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

Gambar 2.3
Persentase Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan juga dipengaruhi dengan Eselon dan Golongan yang ada di Kecamatan Prambon sebagai berikut:

Tabel 2.4

Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	TOTAL
IV A	2
III D	3
III C	3
III B	1
III A	1
II D	8
II C	12
II A	1
TOTAL	31

Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

Gambar 2.5

Berdasarkan Eselon

ESELON	TOTAL
III B	1
IV A	4
IV B	1

Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

Berdasarkan analisis beban kerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Jumlah total kebutuhan pegawai Kecamatan sebanyak 55 orang, eksisting saat ini telah



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



tersedia sebanyak 44 pegawai. Sehingga kebutuhan pegawai pada Kecamatan Prambon masih kurang 11 orang yang dapat mengisi kekosongan tugas yang ada pada Kecamatan Prambon baik berdasarkan kebutuhan Jabatan, tingkat pendidikan maupun kebutuhan jumlah pegawai ASN maupun Non ASN. Adapun tabel data kebutuhan Pegawai sebagai berikut:

Tabel 2.6
Eksisting Kebutuhan Pegawai Kecamatan Prambon

NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN			PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING			
							ASN	NON ASN		
JUMLAH							55	31	13	
1	Camat			1. menetapkan program kerja kecamatan	menetapkan DPA dan DPA perubahan	1	0			
				2. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja	1. mengkoordinasikan bawahan 2. mengkoordinasikan instansi vertikal 3. mengkoordinasikan dengan OPD lain 4. mengkoordinasikan dengan desa					
				3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja	monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja di kecamatan dan desa					
				4. melaporkan pelaksanaan program kerja kepada bupati	melaporkan pelaksanaan program kerja kepada bupati					
2	-	Sekretaris Kecamatan			membantu camat menyiapkan program kerja kecamatan	menyiapkan draft DPA dan DPA perubahan	1	1		
					mengelola TU dan pelayanan kec.	mengelola TU, pelayanan administratif dan pelayanan pengaduan				
					mengelola kepegawaian kec.	mengelola presensi, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, cuti, pembinaan				
					mengelola sarpras kecamatan	mengelola sarpras kecamatan				
					mengelola anggaran kec.	pengadministrasian laporan keuangan kec.				
					menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja kec.	menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja kec.				
3	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian			Mengelola Kepegawaian dan pelayanan umum	1. melaksanakan pengelolahan sarana dan prsarana kantor 2. melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan perpustakaan dan dokumentasi 3. menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 4. menerima dan mengkoordinasi tindak lanjut pelayanan permohonan izin pengaduan masyarakat 5. melaksanakan administrasi kepegawaian 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan tugasnya	1	0		
4	-	Pengelola Data			Data Pelayanan Paten, data SIPRAJA	1. Melayani dan merekap data perekaman KTP 2. Merekap dan memroses cetak KTP 3. Merekap dan memproses pindah datang dan pindah keluar 4. Merekap dan memroses pengajuan AK/1 5. Merekap pengajuan KK 6. Mengarsip berkas Kependudukan dan packing kiriman pos	2	2		
							Data SOP	Menyusun draft SOP dan SP		
							Data SIPP	Entri Data ke Aplikasi		
							Mengelola Humas/pengaduan	Mengelola pengaduan (P3M/ SIAP lapor)		



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN				PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
								ASN	NON ASN
JUMLAH							55	31	13
5					Data Kepegawaian	1. Memproses Pengajuan berkala 2. Memproses Pengajuan Pensiun 3. Memproses Kenaikan Pangkat 4. Merekap Absensi Kepegawaian 5. Entri data dan update aplikasi SINOP 6. Pengajuan cuti 7. Mengadministrasi data pegawai 8. Admin aplikasi SKP 9. Update data Analisis Jabatan 10. Mengadministrasi Surat Kepegawaian 11, Setting shift absensi 12. Pengelolaan laporan kinerja ASN	1	0	
					IP ASN	Input Data ASN			
6					pelayanan adm sarpras penatausahaan aset	1. Mengadministrasi keperluan ATK 2. update data KIR per ruangan 3. Update data KIB 4. Rekap belanja modal, belanja pemeliharaan dan belanja pakai habis 5. Cek kondisi barang dan sarpras yang tercatat di aset minimal 1 tahun sekali (jika diperlukan penghapusan) 6. Update Berita Acara Serah terima pengguna barang 7. Update data di aplikasi SIM BMD 8. Mengadministrasi Sarana Prasarana (kendaraan bermotor, gedung bangunan) 9. Membuat usulan Penghapusan dan Menginventarisasi BMD yang akan di hapus	1	1	
7					Pengadministrasi Kependudukan	1. Menerima pengajuan KK 2. Menerima Pengajuan KIA 3. Menerima Pengajuan KTP 4. Menerima Pengajuan Pindah Datang dan Keluar	0		1
8					1. Layanan TU (surat masuk/keluar) admin ebuddy 2. layanan Front office	1. Pelayanan TU (Surat masuk) admin Ebuddy 1. Pelayanan TU (Surat keluar) admin Ebuddy 2. Mengarsip surat surat kepegawaian 3. Penerima Tamu /memberi penjelasan persyaratan pengajuan berkas 4. Menerima dan memproses berkas Pengajuan Pengesahan Dokumen 5. Menerima dan memproses berkas pengajuan legalisir	2	2	



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN				PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
								ASN	NON ASN
JUMLAH							55	31	13
9					Pranata pasukan pengamanan dalam	(keamanan, ketertiban dalam kantor) diluar jam dinas 3 shift (Sore-Malam, malam-pagi)+ hari libur	Menjaga dan mengamankan kantor	7	4
10					Pramu Kebersihan	(kebersihan lingkungan kantor, pramubakti) Pd jam kerja	1. Melaksanakan kebersihan di Ruang Rapat PKK, taman belakang, ruang seckam, ruang camat, sekretariat, kolam bagian selatan, gudang	2	3
						2. Melaksanakan kebersihan di Ruang pelayanan, halaman depan, ruang satpol, musholla, rumah dinas, kolam bagian utara			
						3. Melaksanakan kebersihan di Ruang Perpustakaan, kesos, perekonomian-pembangunan, transtib, plkb, ruang rapat 2, pendopo 1, pendopo 2, parkir sepeda pegawai			
						Menyiapkan dan membersihkan ruang untuk adenda-agenda rapat			
11					Pengemudi	operasional kecamatan	1. Memeriksa keadaan kendaraan dinas sebelum dipakai.	1	0
						2. Memeriksa mesin dan menambah oli, air radiator dan bahan bakar yang diperlukan.			
						3. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sopir.			
						4. Mengemudikan kendaraan dinas sesuai dengan perintah pimpinan			
					Jabatan Fungsional		5. Memperbaiki kerusakan kecil kendaraan dinas agar dapat beroperasi secara layak		
12					Pranata Komputer Terampil	Perekaman Data dengan validasi	1. Entry, Edit dan cetak KK	1	1
						2. Entry, Edit dan cetak KIA			
						Melakukan Penggandaan Data atau Program	1. Download Foto KIA dan edit		
						Melakukan deteksi /perbaikan jaringan	1. Deteksi kerusakan jaringan		
					Melakukan deteksi /perbaikan sistem operasi komputer	1. Deteksi kerusakan SO Komputer			
					Pranata Komputer Mahir	Perekaman Data dengan validasi	1. Entry, Edit dan cetak KK	1	0
						2. Entry, Edit dan cetak KIA			
						Melakukan Penggandaan Data atau Program	1. Download Foto KIA dan edit		
						Melakukan deteksi /perbaikan jaringan	1. Deteksi kerusakan jaringan		
					Melakukan deteksi /perbaikan sistem operasi komputer	1. Deteksi kerusakan SO Komputer			
13					Kasubbag Perencanaan dan Keuangan			1	1
14					Pengelola Bahan Perencanaan	Mengelola bahan Perencanaan	Menyusun dokumen perencanaan OPD (PK, IKI, IKU, Rencana Aksi, Renja 2021, Renja PAK 2021, PAK PK 2021, Renstra OPD)	2	2
							Menyusun laporan evaluasi kinerja internal OPD (Evaluasi Kinerja Internal TB 1 s/d 4)		



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN				PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
								ASN	NON ASN
JUMLAH							55	31	13
						Menyusun dokumen monitoring kinerja OPD (e-Monev TB 1 s/d 4)			
						Menyusun dokumen laporan kinerja OPD (LAKIB & LPPD)			
						Menyusun Narasi LKPJ (rekomendasi dewan)			
						Entri Data di aplikasi SIRUP			
						Menyusun dokumen penganggaran OPD (DPA 2021, PAK RKA 2021, PAK DPA 2021, RKA 2021)			
15				Pengelola Kegiatan dan Anggaran Bendahara	Bendahara pengeluaran	1. Melakukan pemindahbukuan Online (SPPB) yang dicairkan 2. Menyiapkan pengajuan SPP UP/GU/LS yang dicairkan tepat waktu 3. Menyiapkan laporan keuangan bulanan 2021 dan tahunan 2020, dan data laporan barang 2021 4. Membuat laporan penyerapan anggaran yang disusun 5. Mengumpulkan dan mengarsip jumlah bukti pendukung yang diarsip 6. Memverifikasi bukti pencairan baik melalui PPB online maupun SPP LS dan proses pencairan PPB online	1	1	
16				Pengelola keuangan	Pelaporan Keuangan	Menyiapkan data dan entri dokumen penganggaran OPD Menyiapkan data dan entri Laporan Keuangan OPD Menyiapkan data dan entri Laporan evaluasi serapan anggaran OPD Menyiapkan data dan entri Laporan Keuangan bulanan OPD menyiapkan data permintaan bukti untuk laporan rekon barang entri data PPB online membantu menyiapkan dokumen pengadaan menyiapkan data pendukung kegiatan sekretariat entri data pencatatan / e-PL Membantu laporan PIWK	2		1
17				Pengelola Gaji	Gaji dan Tunjangan	Membuat daftar gaji dengan perubahannya Arsip Gaji dan Tunjangan Membuat SPP dan SPM Gaji Mengisi Kartu Kuning Mengajukan TPP, UM dan Tukin Membuat Payroll Koordinasi dengan Bank kerjasama pemerintah	1		0
18				Kasi Pemerintahan		1. Evaluasi APBDes 2. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain dalam kegiatan Bidang Pemerintahan 3. Pembinaan Perangkat Desa/Kelurahan	1	1	



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
					ASN	NON ASN
JUMLAH				55	31	13
19	-	Pengumpul dan Evaluasi data dari Desa	4. Rapat Koordinasi dengan Kades/Kake/SKPD/Instansi lain 5. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas bidang pemerintahan (monev) 1. Menyiapkan bahan evaluasi APBDes dan verifikasi APBDes 2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat koordinasi bidang pemerintahan 3. Menyiapkan rapat lintas sektor 4. Menyiapkan rapat koordinasi sekretaris Desa 5. Menyiapkan rapat koordinasi kepala desa 6. Menyiapkan sosialisasi keuangan desa 7. Menyiapkan bintek barang dan jasa 8. Menyiapkan sosialisasi aset di Desa 9. Pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa 10. Monitoring dan evaluasi 20 Desa 11. Penjarigan Perangkat Desa 12. Penjaringan BPD 13. Menyiapkan RPJMDes 14. Pelantikan Perangkat Desa Lainnya 15. Pelantikan Pj Kepala Desa 16. Menyiapkan RKPDes 17. Menyiapkan Perdes APBDes 18. Menyiapkan LPDD 19. Menghimpun data RT/RW 20. Menghimpun data linmas Membantu pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain dalam bidang pemerintahan 1. Menghadiri undangan rapat dengan dinas Lain 2. Mencukupi data data dari dinas 3. Penanganan masalah bidang pemerintahan Menyusun rencana program kegiatan tahunan Menyusun rencana program kegiatan tahunan	3	2	
		Pengelola Administrasi Pemerintahan				
20	-	Kasi Pembangunan Fisik	1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan (CAMAT SIDOARJO) 2. melaksanakan musrenbang 3. membantu pelaksanaan dan evaluasi SBH dan berseri 4. menyampaikan laporan usulan yang disepakati ditingkat kecamatan 5. melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan yang bersumber APBN dan APBD 6. melaksanakan penanganan dan pengelolaan sampah 7. melaksanakan pelayanan IMB rumah tinggal dibawah 400 m2 8. melaksanakan kegiatan surat menyurat	1	1	



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING		
					ASN	NON ASN	
JUMLAH				55	31	13	
21	-	Pengelola Data	Data bangunan, data infrastruktur di wilayah kec, data bangunan dan lingkungannya, data wilayah kumuh, data fasum, koordinator pembangunan infrastruktur penghubung desa	9. mengevaluasi dan pengawasan di wilayah kecamatan sidoarjo 1. Menyiapkan kegiatan Sosialisasi IMB 2. Membantu menyusun rencana kegiatan pembinaan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik 3. Membantu Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Kecamatan 4. Membuat Jadwal dan laporan operasi penyisiran sampah 5. Menyusun rencana program kegiatan tahunan 6. Pendataan Infrastruktur Pembangunan Kelurahan/Desa 7. Pendataan Wilayah Kumuh 8. Pendataan Rumah tidak layak Huni 9. Pendataan Rumah tidak Memiliki Jamban 10. Pendataan Ruas Jalan yang Rusak	3	1	
22	-	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	Menerima dan memproses berkas permohonan IMB Rumah tinggal, Membantu pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan serta Lingkungan (PIWK)	1. Melakukan Survey Lokasi, memproses dan Penyusunan SK IMB 1. Membantu survey lokasi kerusakan jalan, Pembersihan Afvoer dan membuat RAB PIWK		1	
23	-	Pengemudi	Mengemudi truk R3 & R4 sampah	1. Penyisiran sampah liar di wilayah kecamatan prambon, mengangkut sampah ke TPA 2. Membersihkan Kendaraan Operasional	2		2
24	-	Pramu Kebersihan	petugas kebersihan dan pertamanan R3 & R4 sampah	1. Penyisiran sampah liar di wilayah kecamatan prambon 2. Membersihkan Kendaraan Operasional	2		2
25	-	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perbup di wil. Kec.	1. Melaksanakan pengamanan pelaksanaan produk-produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan di masyarakat 2. Melaksanakan pendataan, pengawasan, monitoring dan pengendalian Trantibum 3. Melakukan pembinaan Trantibum di Desa 4. Menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban 5. Memfasilitasi dalam kegiatan perlindungan di Desa 6. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Ketentraman dan Ketertiban 7. Melaksanakan tugas lain yg di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya 8. Melakukan upaya-upaya preventif terhadap gangguan trantibum di Desa	1	1	
26	-	Petugas Keamanan	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Patroli Reklame liar	7	6	



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING		
					ASN	NON ASN	
JUMLAH				55	31	13	
			Patroli PKL				
			Patroli bangunan liar				
			Operasi yustisi				
27	-	Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	1. Menyiapkan bahan rapat Forkopimka 2. Menyiapkan bahan rapat Penegakan Perda dan Perbup 3. Menyiapkan laporan kegiatan pembinaan bidang trantibum 4. Pembinaan Linmas 5. Membuat Laporan penertiban reklame 6. Membuat Laporan penertiban IMB 7. Membuat Laporan penertiban PKL 8. Membuat Laporan operasi yustisi	1	1		
		Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain dalam kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum	1. Menyiapkan bahan kegiatan Upacara HUT 2. Menyiapkan bahan Upacara Kesaktian Pancasila 3. Menyiapkan bahan Upacara Korpri			
			Pelaksanaan, Pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan Ketertiban umum	1. Membuat jadwal piket dan jadwal patroli anggota satpol pp			
			Melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas nya	1. Menerima dan menindaklanjuti pengajuan surat ahli waris 2. Menerima dan menindaklanjuti pengajuan ijin keramaian 3. Menyusun rencana program kegiatan tahunan			
28	-	Kasi Perekonomian	1. Menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis bidang urusan perekonomian 2. Melaksanakan program kegiatan dan petunjuk teknis bidang urusan Perekonomian 3. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga serta instansi lain di bidang Perekonomian 4. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perekonomian 5. Mengadakan kegiatan pembinaan pemberdayaan penduduk miskin 6. Mengadakan kegiatan peningkatan pendapatan keluarga 7. Mengadakan kegiatan promosi produk UMKM 8. Melakukan kegiatan pembinaan koperasi wanita 10. Memproses permohonan perijinan yang meliputi, IUMK dan TDP 11. Melaksanakan kegiatan dan tugas lainnya	1	1		
29	-	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	SIPRAJA SIDOARJO (SIUP dan TDP)	1. Menerima dan memproses berkas permohonan SIUP dan TDP usaha mikro	2	3	



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING		
					ASN	NON ASN	
JUMLAH				55	31	13	
		Pelaksanaan koordinasi dengan KOPWAN	1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan KOPWAN 2. Menyiapkan dan membuat SPJ rapat koordinasi dengan KOPWAN 3. Pelaksanaan RAT				
		Membantu pelaksanaan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain dalam bidang perekonomian	Rapat koordinasi dengan Dinas Koperasi Menyusun rencana program kegiatan tahunan				
		Pembinaan UMKM	1. Rapat koordinasi dengan paguyupan 2. Mengikuti Expo di Kabupaten (Persiapan, Pelaksanaan, dan Laporan) 3. Menghimpun dan merekap data bantuan				
		Pembinaan BUMDES	Pembinaan dan evaluasi ke desa-desa				
		Pembinaan Pedagang Kaki Lima	Pembinaan dan evaluasi ke desa-desa				
		IDM	1. Menghimpun data IDM 2. Rapat koordinasi dengan Sekretaris Desa 3. Input data di Aplikasi				
30	-	Kasi Kesejahteraan Sosial	1. Melaksanakan koordinasi	1	0		
			2. Mengikuti ceremonial				
			3. Membuat konsep SK				
			4. Memverifikasi data				
			5. Mengikuti rapat koordinasi				
			6. Melakukan pendampingan				
			7. Membuat konsep surat				
			8. Melaksanakan pembinaan				
			9. Menyusun program kerja				
			10. Melaksanakan monitoring				
			11. Mengetik SPT dan SPPD				
			12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas				
			13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya				
31	-	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Pelayanan SKTM dan Dispensasi Nikah	Melayani Pemrosesan Pengajuan SKTM Melalui aplikasi SIPRAJA Menerima dan Memproses berkas pengajuan Rekomendasi/Dispensasi Nikah	2	2	
			Rapat Koordinasi bidang kesejahteraan sosial dan Keagamaan	Menyiapkan bahan rapat, daftar hadir, Dokumentasi Kegiatan dan menyusun Laporan			
			Pembinaan Bidang Kesos	Menyiapkan Bahan Pembinaan			
				Menyusun rencana program kegiatan tahunan			
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bansos	Monev KPM BPNT			
				Monitoring Evaluasi Tempat ibadah			



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



NO	NAMA JABATAN SESUAI PERMENPAN	PERAN UTAMA	RINCIAN PEKERJAAN	KEBUTUHAN	EKSISTING	
					ASN	NON ASN
JUMLAH				55	31	13
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan bidang kesejahteraan sosial dan bidang keagamaan	Pemberdayaan Perempuan			
			Pembinaan Stunting dan KKS			
			Pendataan tempat ibadah dan tokoh agama			
			Koordinasi dgn instansi lain dgn 5 instansi			
			Rekom induk kesenian			
			Monitoring Evaluasi Tokoh Agama			

Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi dari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo antara lain:

**Tabel 2.7
Peralatan dan Mesin**

No	Sarana	Jumlah	Satuan	Status
1	Kendaraan Roda Empat	4	Unit	Baik
2	Kendaraan Khusus (Patrol)	1	Unit	Baik
3	Kendaraan Roda dua	12	Unit	Baik
4	Kendaraan Roda tiga	2	Unit	Baik
5	Laptop	10	Unit	Baik
6	Komputer	18	Unit	Baik
7	Printer	20	Unit	Baik
8	Mesin Scanner	2	Unit	Baik
9	Mesin Ketik	1	Unit	Baik
10	LCD	2	Unit	Baik
11	Server	1	Unit	Baik
12	AC	26	Unit	Baik

Sumber: Kecamatan Prambon, 2021

Berdasarkan tabel data diatas dapat disampaikan bahwa Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Prambon masih berfungsi dengan Baik dan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas, namun jumlah perlu dilakukan penambahan.



2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Prambon

Kecamatan Prambon sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kinerja Kecamatan Prambon diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan, Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan dilaksanakan dengan baik dan Persentase Desa Maju di Kecamatan. Dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan Prambon telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun secara pencapaian, kinerja Kecamatan Prambon telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai macam kendala pelaksanaan. Dimana Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan antara lain: Jumlah SDM yang berkompeten, Sarana dan Prasarana yang memadai dan Pelayanan yang sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk target yang belum dicapai yaitu semua penduduk dibawah 17 tahun yang memiliki KIA di karenakan kurangnya SDM di Pelayanan.



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



Tabel 2.8
Hasil Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Kecamatan Prambon	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD pada tahun					Realisasi Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan				75	75	76	77	78	81,63	75,11	78,284	87,36	88,43	108,84%	100,14%	103,01%	113,45%	113,37
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Dilaksanakan Dengan Baik				N/A	N/A	66%	100%	100%	N/A	N/A	66,34%	100%	100%	N/A	N/A	100,51%	100%	100%
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan				N/A	N/A	0,7151	0,7250	20	N/A	N/A	0,6453	0,6703	35	N/A	N/A	90,24%	92,45%	175%



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



Tabel 2.9

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja Kecamatan Prambon	Target Anggaran Renstra OPD pada tahun					Realisasi Anggaran Capaian pada tahun					Rasio Capaian pada tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan	N/A	N/A	1.636.117.501	1.348.838.772	1.746.727.175	N/A	N/A	1.541.088.230	1.178.393.980	1.431.896.597	N/A	N/A	94,19%	87,36%	81,98%	77%	84,70%
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Dilaksanakan Dengan Baik	N/A	N/A	832.541.000	743.845.310	595.493.460	N/A	N/A	731.566.400	590.861.429	520.029.406	N/A	N/A	87,87%	79,43%	87,33%	55,12%	56,77%
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan																	



Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator:

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dari tahun ketahun selalu pada capaian kinerja diatas 100% hal ini dalam kategori sangat berhasil.

2. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Dilaksanakan Dengan Baik

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang di delegasikan ke Kecamatan Prambon bahwa dalam kategori berhasil. Hal ini ditandai dengan realisasi telah mencapai 100% pada tahun 2018 hingga 2020.

3. Persentase Desa Maju di Kecamatan

Pada Tahun 2020 capaian rasio kinerja terletak lebih dari 100% hal ini pada kategori sangat berhasil. Tetapi masih kurangnya respon dan antusias dari perangkat desa untuk mengisi data terkait IDM, kurangnya pembinaan secara intensif terhadap aparatur desa terkait pengisian data IDM, kurangnya koordinasi secara intensif dengan dinas terkait dan perangkat desa terkait pengisian data IDM dan evaluasi secara berkala.



RANCANGAN AKHIR KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui bahwa rasio antara realisasi penyerapan anggaran total dan anggaran total sudah cukup baik karena penyerapan anggaran selama tahun 2016-2021 pada rasio capaian melebihi 86% akan tetapi masih kurang maksimal karena kurang dari 100 %. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

Pada sub bab ini akan diuraikan tantangan dan peluang yang didapatkan berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, RTRW dan KLHS.

2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perumusan tantangan dan peluang yang pertama berdasarkan telaah terhadap sasaran dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sasaran renstra kementerian yang sinergi dengan capaian indikator kinerja Kecamatan Prambon periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.10
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Kecamatan Prambon terhadap Sasaran Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Sasaran pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	105,81	- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas - Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	- Berkembangnya status pembangunan desa
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Prambon Dilaksanakan Dengan Baik	100		



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	Sasaran pada Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan Prambon	65,62		

Implikasi sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 terhadap pelayanan Kecamatan Prambon antara lain:

a) Tantangan:

1. Adanya persepsi negative desa terhadap indeks desa membangun. Perangkat desa memilih untuk tidak menaikkan status menjadi desa mandiri untuk menghindari berkurang ADD
2. Masih terdapat warga Masih terdapat warga yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo namun belum mengurus surat keterangan pindah domisili (SKPWNI).
3. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen dan kevalidan data kependudukan masih rendah.
4. Masih belum optimlanya dalam kesadaran masyarakat untuk pengurusan KIA untuk identitas anak

b) Peluang:

1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja pelayanan maupun administratif
2. Kepedulian desa akan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan telah cukup baik
3. Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
4. Adanya arahan dan sosialisasi untuk masyarakat kepentingan pengurusan KIA

2.4.2 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Kriteria kawasan perkotaan adalah adanya kegiatan yang menjadi ciri dari kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kecamatan Prambon pada RTRW terdapat pada Orde K2 adalah Kecamatan Prambon, Kecamatan Krian, Kawasan Pesisir Kecamatan Sedati. Serta pada keterangan Perkotaan kecil di



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



Kabupaten Sidoarjo meliputi perkotaan yang ada di Kecamatan Tulangan, Kecamatan Krembung, Kecamatan Jabon, Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Porong, Kecamatan Tarik, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sukodono. Sementara, jalan akses utama terdiri dari jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan rencana pengembangan interchange Masangan Wetan. Secara rinci hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Prambon dapat ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.11
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Prambon**

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
1	Permukiman	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Penataan ruang kawasan perdesaan Kabupaten Sidoarjo diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya, konservasi sumber daya alam, pelestarian warisan budaya lokal, pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan dan penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan. Oleh karena itu, kawasan perdesaan pada Kecamatan Prambon dapat berupa kawasan agropolitan pertanian dan agropolitan perikanan. Skala pelayanan/type didominasi perumahan real estate, rusun atau kondominium dan rumah biasa/kampung. Implikasi terhadap penyelenggaraan Kecamatan Prambon adalah menjadi potensi target layanan IMB sehingga perlu adanya pengoptimalan sumber daya maupun inovatif pelayanan bidang perizinan khususnya IMB yang efisien dan efektif.
2	Perdagangan dan Jasa	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Perdagangan retail dan besar skala lokal dan skala kabupaten; jasa pemerintahan skala lokal/ kecamatan. Implikasi terhadap Kecamatan Prambon adalah menjadi potensi target layanan perizinan terkait perizinan Usaha Mikro, Kecil maupun penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian yang tepat sasaran sehingga perlu adanya pengoptimalan sumber daya dan inovatif pelayanan bidang perizinan.
3	Fasilitas umum dan fasilitas sosial	Tidak tersedia dokumen fakta dan analisa RTRW	Arah dominasi fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah skala pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan dan peribadatan skala lokal. Adanya fasilitas umum dan sosial berimplikasi pada penyediaan bangunan seperti rambu jalan dan sarana prasarana pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, adanya pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial berpotensi menyebabkan keramaian sehingga perlu adanya optimalisasi sumber daya dan perencanaan penyelenggaraan kegiatan trantribum yang matang

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Struktur Ruang Kecamatan Prambon, tantangan dan peluang pelayanan Kecamatan Prambon untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

Tantangan:

1. Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan Prambon tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Prambon.



2. Belum adanya rincian peta dan pola ruang untuk Kecamatan Prambon.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha.
5. Tidak semua kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat memiliki alokasi anggaran.

Peluang:

1. Terdapat arah pengembangan Kecamatan Prambon berdasarkan RTRW dilihat dari arah dominasi jenis kegiatan yaitu permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Adanya kebijakan-kebijakan baru terkait perizinan usaha yang memudahkan kepengurusan izin dan pengawasan.

2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen KLHS

Pada program kegiatan dan sub kegiatan pada kecamatan tidak termasuk dalam muatan KLHS, namun kedepan program kegiatan sub kegiatan seluruh Kecamatan berkonsep berorientasi keberlanjutan dan lingkungan.



BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN PRAMBON

Pada sub-bab Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Prambon, akan dianalisa terkait masalah pokok atau masalah makro Kecamatan Prambon, Masalah atau penyebab dari timbulnya masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci. Masalah pokok, masalah dan akar masalah Kecamatan Prambon ditunjukkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Masih adanya pelaku usaha yang akan mengurus perizinan di Kecamatan Prambon tidak mengetahui rencana struktur ruang Kecamatan Prambon	Belum adanya informasi terkait rencana struktur pola ruang yang diinformasikan melalui website maupun ruang pelayanan Kecamatan	a. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR c. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon
2	Masih adanya potensi Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang belum memiliki izin	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan IMB	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB b. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
3	Masih adanya potensi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan usaha	a. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP,SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP
4	Banyaknya pertumbuhan angka kelahiran setiap tahunnya	Pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat terkait pencetakan KIA	a. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon



3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2016. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah "**Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani**". Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan**". Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
- b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
- c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Development atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang



tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

- d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (Lima) misi tersebut:

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sektor potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok



pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luas khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan sosial yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolitan gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai



karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Tujuan dan Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga			
Tujuan Misi 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha Sasaran 1: Terselenggaranya pelayanan publik	1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon	1. Minimalnya informasi yang diberika kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB	1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB 5. Menambah SDM untuk melakukan jemput bola pelayanan TDP & SIUP



Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Tujuan dan Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha</p> <p>Tujuan Misi 5: Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat</p> <p>Sasaran 2: Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram</p>	<p>4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB</p> <p>5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah</p> <p>6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP</p> <p>7. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon</p>	<p>5. Minimalnya arah Dinas Pemberdayaan Desa pada aparatur desa</p> <p>6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus TDP, SIUP</p> <p>7. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa</p> <p>8. Kurangnya SDM di Pelayanan</p>	<p>6. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa</p> <p>7. Menambah SDM di pelayanan</p>



3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarnya.

Tabel 3.3

Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No (1)	Tujuan Strategis (2)	Sasaran Strategis (3)
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah c. Meningkatnya kewaspadaan nasional d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
2	Peningkatan kapsaitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan e. Meningkatnya tata kelola penyelenggraan kewilayahan
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan lingkungan Kementerian dalam Negeri	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri



Tabel 3.4

Telaah Renstra Kementerian

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 6. kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP serta kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP 7. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalnya informasi yang diberika kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB 5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus & TDP, SIUP 6. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa 7. Masih kurang SDM di Pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB dan pengurusan TDP, SIUP 5. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa 6. Menambah SDM di pelayanan



3.4 TELAAHAN RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029. Telaah terhadap RTRW bertujuan agar pembangunan lima tahun kedepan tidak menyimpang dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa fungsi RTRW kabupaten antara lain:

- a. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah
- b. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan:

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
- c. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penelaahan RTRW dan KLHS haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut, dalam hal ini perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi Kecamatan Prambon tidak secara langsung berkaitan dengan urusan dalam RTRW maupun KLHS. Tupoksi Kecamatan Prambon lebih mengarah pada fungsi koordinasi dan fasilitasi. Oleh karena itu dalam telaah ini kedudukan Kecamatan Prambon hanya sebagai pendukung pelaksanaan RTRW dan KLHS. Sehingga isu yang muncul berdasarkan RTRW maupun KLHS tidak dapat secara langsung terselesaikan melalui program dan kegiatan pada Kecamatan.



Tabel 3.5

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Pengembangan Kawasan Terkait Tugas Perangkat Desa	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Pemukiman pedesaan maupun perkotaan 2. Perdagangan dan Jasa 3. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah 2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR 3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon 4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB 5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah 6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP 7. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalnya informasi yang diberikan kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha 2. Belum keseluruhan SDM mengerti tentang SPM bidang PUPR 3. Minimnya kesadaran masyarakat akan kepengurusan IMB, TDP, SIUP 4. Masih kurangnya SDM dalam pengawasan IMB 5. Minimalnya arah Dinas Pemberdayaan Desa pada aparatur desa 6. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa 7. Kurangnya SDM di pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha 2. Adanya pelatihan pemahaman tentang SPM bidang PUPR 3. Sosialisasi kepada desa dan masyarakat untuk kepentingan pelaporan dan pengurusan IMB, TDP, SIUP 4. Penambahan SDM untuk pengawasan IMB 5. Kecamatan yang ikut mensupport desa untuk menjadikan desa maju ke desa mandiri 6. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa 7. Menambah SDM di Pelayanan



3.5 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka isu-isu strategis yang terkait adalah

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah
2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR
3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon
4. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB
5. kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah
6. kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP
7. Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum
8. Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon

Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
 - b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:



Tabel 3.6

Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis

Berdasarkan skor kriteria penentu isu strategi telah ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap public	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Tabel 3.7

Total Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,10)	3 (0,20)	4 (0,10)	5 (0,15)	6 (0,25)	7 (100)
1	Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah	5	5	4	5	4	4	4,40
2	Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR	5	5	5	5	5	5	5,00
3	Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Prambon	4	4	4	3	3	3	3,50
4	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki IMB dan kemudahan dalam mengurus IMB	4	4	4	4	4	3	3,75



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,10)	3 (0,20)	4 (0,10)	5 (0,15)	6 (0,25)	7 (100)
5	kurangnya personil/SDM kecamatan untuk melakukan jemput bola atau pengawasan langsung kerumah-rumah	5	5	5	4	4	5	4,75
6	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki TDP, SIUP dan kemudahan dalam mengurus TDP, SIUP	4	4	4	4	3	3	3,60
7	Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan ketentraman dan ketertiban umum	5	5	5	5	4	4	4,60
8	Meningkatnya jumlah pengajuan cetak KIA, kecamatan bekerjasama dengan UPT Dinas pendidikan memfasilitasi kolektif pengajuan cetak KIA untuk menghindari kerumuman pengajuan secara langsung di Ruang Pelayanan Kecamatan Prambon	4	4	4	4	3	3	3,60

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Prambon perlu memprioritaskan pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah "**Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani**". Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah "**Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**". Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (Lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha**". dan misi 5 (lima) yakni "**Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada NilaiNilai Keagamaan serta Mampu**



Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga ". Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Berikut dirumuskan tujuan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum"

Selain tujuan PD dirumuskan sasaran dari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran pada Misi 1 RPJMD:															
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital															
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha															
Sasaran pada Misi 5 RPJMD:															
1. Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram															
Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan						Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12	13	14
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai SKM Kecamatan	79	79	80	81	82	83	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	76	75	75,3	75,4	75,5	75,6
								Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2. Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	74%	75%	76%	77%	78%	79%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha. Dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha.

Strategi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 dapat ditentukan melalui kepentingan peran dari RTRW yaitu Saat ini informasi yang terdapat belum terpublikasi di website resmi Kecamatan Prambon <https://prambon.sidoarjokab.go.id/> dan pada peta pola ruang dan peta struktur ruang wilayah Kecamatan Prambon secara digital maupun analog belum di tempel lobby pelayanan dan di website resmi Kecamatan Prambon.

5.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan dari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT
2. Evaluasi secara berkala mengenai pelayanan sesuai dengan SOP
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan
4. Melakukan koordinasi antar OPD yang ada di Kecamatan Prambon
5. Meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan
6. Pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum untuk kepentingan bersama



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.			
MISI 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha			
MISI 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat berbasis sistem IT memudahkan jangkauan dalam akses pada masing-masing desa	<ol style="list-style-type: none">1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT2. Evaluasi secara berkala mengenai pelayanan sesuai dengan SOP3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan4. Melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Prambon5. Meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Penciptaan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan, sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat dan desa untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum untuk kepentingan bersama



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja PD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Startegis Organisasi. Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni **“Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”**. dan misi kelima yakni **“Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga”**

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo
yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

Indikator Tujuan/ Sasaran	Target capaian kinerja					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1: meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum						
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kecamatan	79	79	80	81	82	83
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan						
Nilai SAKIP Kecamatan Prambon	74	75	75,3	75,4	75,5	75,6
Sasaran 2: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum						
Permasalahan trantibum yang difasilitasi Prambon di anggarkan dan dilaksanakan dengan Baik	74%	75%	76%	77%	78%	79%



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**





BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi:

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

B. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - c. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- E. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan"
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Penyediaan Bahan/Material
 - h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - f. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - g. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Indikatif Kecamatan Prambon Tahun 2021-2026

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2026)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14	15	
Meningkatkan kualitas Pelayanan Perencanaan, Pemerintahan, Ketertarikan dan Keterbacaan Umum	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	3	1 PROGRAM PENWILAYAHAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase baik yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	a. NA b. 100% c. 100%	a. 100% b. 100% c. 100%	1,496,903.2 33	a. 100% b. 100% c. 100%	855,158,750	a. 100% b. 100% c. 100%	897,916,688	a. 100% b. 100% c. 100%	948,812,522	a. 100% b. 100% c. 100%	989,953,148	a. 100% b. 100% c. 100%	1,039,706,61	a. 100% b. 100% c. 100%	1,091,691,364	Kasubag Umum & Kesawajaan, Kasi Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan, Perencanaan	Kecamatan Prambon	
				1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	NA	3000 Berkas	3,900,000	4000 Berkas	5,512,500	4000 Berkas	5,788,125	4000 Berkas	6,077,531	4000 Berkas	6,381,408	4000 Berkas	6,955,734	4000 Berkas	7,303,521	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. Jumlah pelayanan umum yang diterima b. Jumlah Peserta sosialisasi Pelayanan Umum	a. NA b. 40 orang	a. 3000 Berkas b. 40 Orang	3,900,000	a. 4000 Berkas b. 40 Orang	5,512,500	a. 4000 Berkas b. 40 Orang	5,788,125	a. 4000 Berkas b. 40 Orang	6,077,531	a. 4000 Berkas b. 40 Orang	6,381,408	a. 4000 Berkas b. 40 Orang	6,955,734	a. 4000 Berkas b. 40 Orang	7,303,521	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
				2. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	85%	17 Laporan	174,110,000	15 Laporan	57,163,750	14 Laporan	60,021,938	14 Laporan	69,023,034	14 Laporan	66,174,186	14 Laporan	69,482,895	14 Laporan	72,957,040	Kasi Kesos, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Perencanaan	
				Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Jumlah rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang dilaksanakan c. Jumlah rapat koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan d. Jumlah rapat koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan	a. NA b. NA c. NA d. NA	a. 6 kali b. 2 kali c. 7 kali d. 2 kali	174,110,000	a. 7 Kegiatan b. 2 Kegiatan c. 3 Kegiatan d. 3 Kegiatan	57,163,750	a. 7 Kegiatan b. 2 Kegiatan c. 2 Kegiatan d. 3 Kegiatan	60,021,938	a. 7 Kegiatan b. 2 Kegiatan c. 2 Kegiatan d. 3 Kegiatan	69,023,034	a. 7 Kegiatan b. 2 Kegiatan c. 2 Kegiatan d. 3 Kegiatan	66,174,186	a. 7 Kegiatan b. 2 Kegiatan c. 2 Kegiatan d. 3 Kegiatan	69,482,895	a. 7 Kali b. 2 Kali c. 2 Kali d. 3 Kali	72,957,040	Kasi Kesos, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Perencanaan	
				3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasannya maksimal 400m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat, agama dan masyarakat, pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun 3. Jumlah laporan kegiatan pembebasan yang tersusun	NA	1. 6 berkas 2. 1 Laporan 3. 3 Laporan	1,318,893.2 33	1. 12 Berkas 2. 1 Laporan 3. 4 Laporan	792,482,500	1. 12 Berkas 2. 4 Laporan 3. 6 Laporan	832,106,625	1. 12 Berkas 2. 4 Laporan 3. 6 Laporan	873,711,956	1. 12 Berkas 2. 4 Laporan 3. 6 Laporan	917,397,554	1. 12 Berkas 2. 4 Laporan 3. 6 Laporan	963,267,432	1. 12 Berkas 2. 4 Laporan 3. 6 Laporan	1,011,430,803	Kasi Kesos, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Perencanaan	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasannya maksimal 400m2 yang diterbitkan	88,81%	6 berkas	3,675,000	12 Berkas	2,962,500	12 Berkas	3,110,625	12 Berkas	3,266,156	12 Berkas	3,429,464	12 Berkas	3,600,937	12 Berkas	3,780,984	Kasi Pembangunan	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	a. Jumlah monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat b. Jumlah monev bidang pembangunan dan lingkungan c. Jumlah monev bidang pemerintahan d. Jumlah monev bidang perekonomian	a. NA b. NA c. NA d. NA e. NA	a. 1 Kegiatan b. 0 Kegiatan c. 0 Kegiatan d. 0 Kegiatan	2,137,500	a. 1 Kegiatan b. 0 Kegiatan c. 0 Kegiatan d. 0 Kegiatan	1,912,500	a. 1 Kegiatan b. 1 Kegiatan c. 1 Kegiatan d. 1 Kegiatan	2,008,125	a. 1 Kegiatan b. 1 Kegiatan c. 1 Kegiatan d. 1 Kegiatan	2,108,531	a. 1 Kegiatan b. 1 Kegiatan c. 1 Kegiatan d. 1 Kegiatan	2,213,958	a. 1 Kegiatan b. 1 Kegiatan c. 1 Kegiatan d. 1 Kegiatan	2,324,656	a. 1 Kegiatan b. 1 Kegiatan c. 1 Kegiatan d. 1 Kegiatan	2,440,888	Kasi Kesos, Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Perencanaan	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	a. Jumlah Kegiatan pembinaan tentang lingkungan hidup dan pengorganisasian sampah domestik yang telah dilaksanakan b. Jumlah kegiatan	a. NA b. NA c. NA d. NA e. NA	a. 1 Kegiatan b. 1 Kegiatan c. 1 Kegiatan	1,313,080.7 33	a. 2 Kegiatan b. 3 Kegiatan c. 1 Kegiatan	787,607,500	a. 2 Kegiatan b. 3 Kegiatan c. 1 Kegiatan	826,987,875	a. 2 Kegiatan b. 3 Kegiatan c. 1 Kegiatan	868,307,269	a. 2 Kegiatan b. 3 Kegiatan c. 1 Kegiatan	911,754,132	a. 2 Kegiatan b. 3 Kegiatan c. 1 Kegiatan	957,341,839	a. 2 Kegiatan b. 3 Kegiatan c. 1 Kegiatan	1,005,208,931	Kasi Pembangunan, Kasi Pemerintahan, Kasi Perencanaan	



RANCANGAN AKHIR KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026



Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2020)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
				<p>2. PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	<p>persentase selisih ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan c. Jumlah kegiatan pembinaan pedagang kaki lima yang telah dilaksanakan</p> <p>persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik</p> <p>Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan</p>	<p>NA</p> <p>a. 1 kegiatan b. NA</p>	<p>100%</p> <p>1 Kegiatan</p>	<p>1.160.000</p> <p>1.160.000</p>	<p>100%</p> <p>3 Kegiatan</p>	<p>38.730.062</p> <p>38.730.062</p>	<p>100%</p> <p>3 Kegiatan</p>	<p>40.666.586</p> <p>40.666.586</p>	<p>100%</p> <p>3 Kegiatan</p>	<p>75.666.790</p> <p>75.666.790</p>	<p>100%</p> <p>3 Kegiatan</p>	<p>42.699.915</p> <p>42.699.915</p>	<p>100%</p> <p>3 Kegiatan</p>	<p>44.834.911</p> <p>44.834.911</p>	<p>100%</p> <p>3 Kegiatan</p>	<p>47.076.657</p> <p>47.076.657</p>	<p>Kasi Trantib</p> <p>Kasi Trantib</p>			
			<p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memertajakan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Prestasi Bhinneka Tunggal Ika Serta Peningkatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>	<p>a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan b. Jumlah lomba lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional</p>	<p>a. 1 kegiatan b. NA</p>	<p>1 Kegiatan</p>	<p>1.160.000</p>	<p>a. 2 Kegiatan b. 0 Kali</p>	<p>38.730.062</p>	<p>a. 2 Kegiatan b. 0 Kali</p>	<p>40.666.586</p>	<p>a. 2 Kegiatan b. 0 Kali</p>	<p>42.699.915</p>	<p>a. 2 Kegiatan b. 0 Kali</p>	<p>44.834.911</p>	<p>a. 2 Kegiatan b. 0 Kali</p>	<p>47.076.657</p>	<p>a. 2 Kegiatan b. 0 Kali</p>	<p>49.430.490</p>	<p>Kasi Trantib</p>				
			<p>Pembinaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</p>	<p>Jumlah kegiatan FORKOPIMKA yang dilaksanakan</p>	<p>NA</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1 Kegiatan</p>	<p>5.587.500</p>	<p>1 Kegiatan</p>	<p>5.866.875</p>	<p>1 Kegiatan</p>	<p>6.160.219</p>	<p>1 Kegiatan</p>	<p>6.468.230</p>	<p>1 Kegiatan</p>	<p>6.791.641</p>	<p>1 Kegiatan</p>	<p>7.191.641</p>	<p>Kasi Trantib</p>				
			<p>Peningkatan Kualitas Demokrasi Berdasarkan Pancasila</p>	<p>Jumlah desa yang mendapatkan fasilitas pilkada, pilab, pilren</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>20 Desa</p>	<p>27.100.000</p>	<p>20 Desa</p>	<p>27.100.000</p>	<p>20 Desa</p>	<p>27.100.000</p>	<p>Kasi Pemerintahan</p>											
			<p>3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>5. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu</p> <p>Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu</p>	<p>85%</p> <p>85%</p>	<p>90%</p> <p>20 desa</p>	<p>27.412.500</p> <p>27.412.500</p>	<p>100%</p> <p>20 desa</p>	<p>54.237.500</p> <p>54.237.500</p>	<p>100%</p> <p>20 desa</p>	<p>56.949.375</p> <p>56.949.375</p>	<p>100%</p> <p>20 desa</p>	<p>69.792.660</p> <p>69.792.660</p>	<p>100%</p> <p>20 desa</p>	<p>73.282.293</p> <p>73.282.293</p>	<p>100%</p> <p>20 desa</p>	<p>76.946.407</p> <p>76.946.407</p>	<p>100%</p> <p>20 desa</p>	<p>80.793.728</p> <p>80.793.728</p>	<p>Kasi Pemerintahan</p> <p>Kasi Pemerintahan</p>				
			<p>Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</p>	<p>a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa perubahan yang telah dievaluasi</p>	<p>a. NA b. NA</p>	<p>a. 20 Desa b. 20 Desa</p>	<p>19.000.000</p>	<p>a. 20 Desa b. 20 Desa</p>	<p>49.262.500</p>	<p>a. 20 Desa b. 20 Desa</p>	<p>51.725.625</p>	<p>a. 20 Desa b. 20 Desa</p>	<p>64.307.722</p>	<p>a. 20 Desa b. 20 Desa</p>	<p>67.523.108</p>	<p>a. 20 Desa b. 20 Desa</p>	<p>70.899.264</p>	<p>a. 20 Desa b. 20 Desa</p>	<p>74.444.227</p>	<p>a. 20 Desa b. 20 Desa</p>	<p>78.089.227</p>	<p>Kasi Pemerintahan</p>		
			<p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</p>	<p>Jumlah kegiatan pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan</p>	<p>a. 4 Kali</p>	<p>a. 3 Kali</p>	<p>8.412.500</p>	<p>a. 2 Kegiatan</p>	<p>4.975.000</p>	<p>a. 2 Kegiatan</p>	<p>5.223.750</p>	<p>a. 2 Kegiatan</p>	<p>5.484.938</p>	<p>a. 2 Kegiatan</p>	<p>5.759.184</p>	<p>a. 2 Kegiatan</p>	<p>6.047.144</p>	<p>a. 4 Kali</p>	<p>6.349.501</p>	<p>a. 4 Kali</p>	<p>6.649.501</p>	<p>Kasi Pemerintahan</p>		
			<p>4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</p>	<p>Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan</p>	<p>98</p>	<p>98</p>	<p>5.790.899,77</p>	<p>95</p>	<p>5.882.211,534</p>	<p>95</p>	<p>6.581.322,111</p>	<p>95</p>	<p>6.785.138,216</p>	<p>95</p>	<p>6.809.395,127</p>	<p>95</p>	<p>7.149.864,883</p>	<p>95</p>	<p>7.507.358,128</p>	<p>95</p>	<p>7.874.716,356</p>	<p>Kasubag Perencanaan & Keuangan, Kasubag Umum & Kesekretariatan</p>		
			<p>6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>	<p>a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditandatangani</p>	<p>a. NA b. NA</p>	<p>a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi</p>	<p>64.515.916</p>	<p>a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi</p>	<p>15.479.100</p>	<p>a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi</p>	<p>16.253.055</p>	<p>a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi</p>	<p>17.065.708</p>	<p>a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi</p>	<p>17.916.993</p>	<p>a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi</p>	<p>18.814.943</p>	<p>a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi</p>	<p>19.755.690</p>	<p>a. 4 tahapan b. 4 rekomendasi</p>	<p>20.739.690</p>	<p>Kasubag Perencanaan & Keuangan</p>		
			<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p>	<p>Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun</p>	<p>NA</p>	<p>7 Dokumen</p>	<p>56.986.843</p>	<p>7 Dokumen</p>	<p>7.785.100</p>	<p>7 Dokumen</p>	<p>8.174.355</p>	<p>7 Dokumen</p>	<p>8.583.073</p>	<p>7 Dokumen</p>	<p>9.012.226</p>	<p>7 Dokumen</p>	<p>9.462.838</p>	<p>7 Dokumen</p>	<p>9.935.890</p>	<p>7 Dokumen</p>	<p>10.439.940</p>	<p>Kasubag Perencanaan & Keuangan</p>		
			<p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p>	<p>Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun</p>	<p>NA</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Kasubag Perencanaan & Keuangan</p>		
			<p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p>	<p>Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun</p>	<p>NA</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Kasubag Perencanaan & Keuangan</p>		
			<p>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</p>	<p>Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun</p>	<p>NA</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>Kasubag Perencanaan & Keuangan</p>		
			<p>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Intisipasi Realisasi Kinerja SKPD</p>	<p>Jumlah laporan kinerja PD yang disusun</p>	<p>NA</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>878.234</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>1.252.000</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>1.314.600</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>1.380.330</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>1.449.347</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>1.521.814</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>1.597.905</p>	<p>2 Dokumen</p>	<p>1.670.905</p>	<p>Kasubag Perencanaan & Keuangan</p>		



RANCANGAN AKHIR KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2020)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen moxev PD yang disusun	NA	4 Dokumen	6.650.839	4 Dokumen	6.442.000	4 Dokumen	6.764.100	4 Dokumen	7.102.305	4 Dokumen	7.457.420	4 Dokumen	7.830.291	4 Dokumen	8.221.806	Kasubag Perencanaan & Keuangan	
			7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	NA	75%	3.792.287,25	75%	3.987.156,486	76%	4.186.514,310	77%	4.395.840,026	78%	4.615.632,027	79%	4.846.413,628	80%	5.088.734,10	Kasubag Perencanaan & Keuangan	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	NA	32 Orang/bulan	3.740.178,932	32 Orang/bulan	3.981.142,929	36 Orang/bulan	4.180.200,079	36 Orang	4.389.210,079	36 Orang	4.608.670,583	36 Orang	4.839.104,112	36 Orang	5.081.059,318	Kasubag Perencanaan & Keuangan	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	NA	1 laporan	43.945.020	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		Kasubag Perencanaan & Keuangan	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengakuan Vertikal Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	NA	84 SPM		84 SPM		84 SPM		84 SPM		84 SPM		84 SPM		84 SPM		Kasubag Perencanaan & Keuangan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	NA	1 Dokumen	4.192.794	1 Dokumen	1.601.160	1 Dokumen	1.681.218	1 Dokumen	1.765.279	1 Dokumen	1.853.543	1 Dokumen	1.946.220	1 Dokumen	2.043.531	Kasubag Perencanaan & Keuangan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an/ PD yang tersusun	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Semester an/ PD yang tersusun	NA	12 laporan	3.970.507	12 laporan	4.412.397	12 laporan	4.633.017	12 laporan	4.864.668	12 laporan	5.107.901	12 laporan	5.363.296	12 laporan	5.631.461	Kasubag Perencanaan & Keuangan	
			8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	a. NA b. NA	a. 100% b. 5%	a. 100% b. 5%	a. 100% b. 6%	a. 100% b. 7%	a. 100% b. 8%	a. 100% b. 9%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 10%	a. 100% b. 10%	Kasubag umum & Kepegawaian		
			Pengadaan Pakelan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang disediakan	NA	43 Setel		43 Setel		43 Setel		43 Setel		43 Setel		43 Setel		43 Setel		Kasubag umum & Kepegawaian	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	NA	30 Orang		30 Orang		32 Orang		32 Orang		32 Orang		32 Orang		32 Orang		Kasubag umum & Kepegawaian	
			9. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88	79	288.297.224	79	407.767.698	80	428.156.083	81	449.563.887	82	472.042.081	83	495.644.185	83	520.426.395	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen katr & perlengkapan yang tersedia	NA	16 Jenis	15.183.509	10 jenis	8.328.650	295 Buah	8.745.083	295 Buah	9.182.337	295 Buah	9.641.453	295 Buah	10.123.526	295 Buah	10.629.702	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	NA	50 Jenis	50.374.551	1368 Buah	52.893.279	1368 Buah	55.537.942	1368 Buah	58.314.840	1368 Buah	61.230.582	1368 Buah	64.292.111	1368 Buah	67.448.843	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	NA	0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		0 Buah		Kasubag umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan b. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	a. 3663 liter b. NA	10000 Liter	92.000.000	132.000.000	10000 Liter	138.800.000	145.530.000	10000 Liter	152.800.500	10000 Liter	160.446.825	10000 Liter	168.469.166	10000 Liter	176.688.637	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	NA	7 jenis	9.775.161	7 jenis	8.125.360	7 jenis	8.531.628	7 jenis	8.958.209	7 jenis	9.406.120	7 jenis	9.878.428	7 jenis	10.370.247	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku, bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	NA	12 Buah	1.440.000	12 Buah	1.560.000	12 Buah	1.638.000	12 Buah	1.719.900	12 Buah	1.805.895	12 Buah	1.896.190	12 Buah	1.990.999	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang tersedia	NA	NA		36 Jenis	37.597.428	31 Jenis	39.477.299	31 Jenis	41.451.164	31 Jenis	43.523.723	31 Jenis	45.699.909	31 Jenis	47.984.904	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	a. NA b. NA	a. 750 Kotak b. 1100 orang	53.764.800	a. 1100 Kotak b. 1100 orang	49.263.000	a. 1100 Kotak b. 1100 orang	51.726.150	a. 1100 Kotak b. 1100 orang	54.312.458	a. 1100 Kotak b. 1100 orang	57.028.080	a. 1100 Kotak b. 1100 orang	59.879.494	a. 1100 Kotak b. 1100 orang	62.873.459	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang diterbitkan b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	a. NA b. NA	a. 100 % b. 0 Kali	116.133.754	a. 100 % b. 0 Kali	120.518.709	a. 100 % b. 0 Kali	126.544.644	a. 100 % b. 0 Kali	132.671.877	a. 100 % b. 0 Kali	139.515.471	a. 100 % b. 0 Kali	146.491.244	a. 100 % b. 0 Kali	153.815.806	Kasubag umum & Kepegawaian	
			10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	NA	16 Unit	146.621.200	14 Unit	122.848.000	78 Unit	833.990.400	21 Unit	435.439.920	20 Unit	142.211.916	20 Unit	149.322.512	20 Unit	156.788.637	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	NA	0 unit		0 unit		0 unit		1 unit	300.000.000	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	NA	0 unit		0 unit		8 unit	390.000.000	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	Kasubag umum & Kepegawaian	
			Pengadaan Mebel	Jumlah meubelur yang diadakan	NA	0 unit		0 unit		50 Unit	15.000.000	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	Kasubag umum & Kepegawaian	



RANCANGAN AKHIR KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2020)						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14	15					
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	NA	16 unit	146.621.200	4 unit	109.708.500	10 unit	115.193.925	10 unit	120.953.621	10 unit	127.001.302	10 unit	133.351.367	10 unit	140.018.936	10 unit	140.018.936	kasubag umum & Kepegawaian			
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	NA	0 unit		0 unit		0 unit		0 unit	kasubag umum & Kepegawaian												
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	NA	0 unit		0 unit		0 unit		0 unit	kasubag umum & Kepegawaian												
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	NA	0 unit		0 unit		0 unit		0 unit	kasubag umum & Kepegawaian												
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	NA	0 unit		10 Unit	13.139.550	10 Unit	13.796.475	10 Unit	14.486.299	10 Unit	15.210.614	10 Unit	15.971.144	10 Unit	16.769.702	10 Unit	16.769.702	10 Unit	16.769.702	kasubag umum & Kepegawaian	
				11. Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	NA	100%	1.073.505,532	100%	1.128.560,299	100%	1.184.988,263	100%	1.244.237,676	100%	1.306.449,559	100%	1.371.772,037	100%	1.440.360,639	100%	1.440.360,639	100%	1.440.360,639	kasubag umum & Kepegawaian	
				Penyelesaian Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3084 Surat	2500 Surat	31.970.963	2500 Surat	35.895.850	2500 Surat	37.690.643	2500 Surat	39.575.175	2500 Surat	41.553.933	2500 Surat	43.631.630	2500 Surat	45.813.212	2500 Buah	45.813.212	2500 Buah	45.813.212	kasubag umum & Kepegawaian	
				Penyelesaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Roket/mesin listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan	123.000.000	12 Bulan	145.800.000	12 Bulan	153.090.000	12 Bulan	160.744.500	12 Bulan	168.781.725	12 Bulan	177.220.811	12 Bulan	186.081.852	12 Bulan	186.081.852	12 Bulan	186.081.852	kasubag umum & Kepegawaian	
				Penyelesaian Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	NA				90%			90%		90%		90%		90%		90%		90%	kasubag umum & Kepegawaian		
				Penyelesaian Jasa Pelajaran Umum Kantor	a. Jumlah tenaga keahliannya kantor yang terbayar b. Jumlah tenaga keahliannya kantor yang terbayar c. Jumlah pengelola keahliannya dan barang yang terbayar d. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	a. NA b. NA c. NA d. NA	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	918.534.969	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	946.864.400	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	994.207.620	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	1.043.918.001	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	1.096.113.901	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	1.150.919.590	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	1.208.465.576	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	1.268.465.576	a. 3 Orang/ bulan b. 4 Orang/ bulan c. 12 Orang/ bulan d. 6 Orang/ bulan	1.328.465.576	kasubag umum & Kepegawaian	
				12 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	NA	19 unit	424.700.000	19 unit	220.400.000	19 Unit	231.420.000	19 Unit	242.991.000	19 Unit	255.140.500	19 Unit	267.897.578	19 Unit	281.292.456	19 Unit	281.292.456	19 Unit	281.292.456	kasubag umum & Kepegawaian	
				Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara b. Jenis bahan peralatan dan bahan pemeliharaan kendaraan yang tersedia c. Jumlah STNK kendaraan jabatan yang lunas papaknya dalam satu tahun	NA	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	18.000.000	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	23.000.000	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	24.150.000	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	25.357.500	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	26.625.375	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	27.956.644	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	29.354.476	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	29.354.476	a. 2 Unit b. 0 Buah c. 2 Unit	29.354.476	kasubag umum & Kepegawaian	
				Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	a. Jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara b. Jenis bahan peralatan dan bahan pemeliharaan kendaraan yang tersedia c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas papaknya	a. NA b. NA c. NA	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 17 Unit	35.000.000	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 17 Unit	33.000.000	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 19 Unit	34.650.000	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 19 Unit	36.382.500	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 19 Unit	38.201.625	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 19 Unit	40.111.706	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 17 Unit	42.117.292	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 17 Unit	42.117.292	a. 17 Unit b. 0 Buah c. 17 Unit	42.117.292	kasubag umum & Kepegawaian	
				Pemeliharaan Mebel	Jenis mebel/ur yang dipelihara	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kasubag umum & Kepegawaian	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	NA	-	-	-	-	14 Unit	109.620.000	14 Unit	115.101.000	14 Unit	120.856.050	14 Unit	126.898.853	14 Unit	133.243.795	14 Unit	133.243.795	14 Unit	133.243.795	kasubag umum & Kepegawaian	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/ruah atau dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	NA	738M2	304.700.000	738M2	60.000.000	738M2	63.000.000	738M2	66.150.000	738M2	69.457.500	738M2	72.930.375	738M2	76.576.894	1 Gedung	76.576.894	1 Gedung	76.576.894	kasubag umum & Kepegawaian	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	NA	10 Unit	67.000.000	14 Unit	104.400.000															kasubag umum & Kepegawaian	
				13 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	a. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi b. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	NA	a. 100% b. -	942.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	kasubag umum & Kepegawaian	



**RANCANGAN AKHIR
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**



Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah (2020)	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
			Rakornisasi dan penyusunan Laporan Barang M&K Daerah pada SKPD	a. Jumlah Rakornisasi BMD SKPD yang dilakukan b. Jumlah Laporan Barang yang disusun	a. 4 kali b. 4 Laporan	942.852	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengurus Barang						
	Meningkatkan Keterbacaan dan Keterbantuan Umum		5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	a. 85% b. 100%	90%	401.242.500	100%	32.247.500	100%	29.180.500	100%	35.094.777	100%	36.849.916	100%	38.691.992	100%	40.626.591	Kasi Trantib, Kasi Kesos	
			14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbantuan Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan keterbantuan umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang terasusun	a. NA b. NA	7 Laporan	281.222.500	6 Laporan	26.660.000	6 Laporan	27.993.000	6 Laporan	33.847.962	6 Laporan	35.540.297	6 Laporan	37.317.312	6 Laporan	39.163.178	Kasi Trantib, Kasi Kesos	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	a. Jumlah kegiatan koordinasi bidang ketenteraman dan keterbantuan umum yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pembinaan Lirmas yang dilaksanakan	NA	a. 0 Kegiatan b. 1 Kegiatan		a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	6.410.000	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	6.730.500	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	11.522.277	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	12.098.391	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	12.703.310	a. 2 Kegiatan b. 1 Kegiatan	13.338.476	Kasi Trantib	
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah dilaksanakan	NA	6 Kegiatan	281.222.500	3 Kegiatan	20.250.000	3 Kegiatan	21.262.500	3 Kegiatan	22.326.625	3 Kegiatan	23.441.906	3 Kegiatan	24.614.002	3 Kegiatan	25.844.702	Kasi Kesos	
			15. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	NA	12 Permasalahan	120.020.000	12 Permasalahan	5.587.500	12 Permasalahan	1.187.500	12 Permasalahan	1.246.875	12 Permasalahan	1.309.219	12 Permasalahan	1.374.680	12 Permasalahan	1.443.414	Kasi Trantib	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah operasi penerasan dan pemogakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan b. Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang terdapat c. Jumlah monev bidang ketenteraman dan keterbantuan umum yang dilaksanakan	a. NA b. NA	a. 48 Kegiatan b. 12 Permasalahan c. 0 Kegiatan	120.020.000	a. 264 Kegiatan b. 12 Permasalahan c. 0 Kegiatan	5.587.500	a. 264 Kegiatan b. 12 Permasalahan c. 1 Kegiatan	1.187.500	a. 264 Kegiatan b. 12 Permasalahan c. 1 Kegiatan	1.246.875	a. 264 Kegiatan b. 12 Permasalahan c. 1 Kegiatan	1.309.219	a. 264 Kegiatan b. 12 Permasalahan c. 1 Kegiatan	1.374.680	a. 264 Kegiatan b. 12 Permasalahan c. 1 Kegiatan	1.443.414	Kasi Trantib	



BAB VIII PENUTUP

Review Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Prambon dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Prambon, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Prambon.

Sidoarjo, 17 September 2021
**Pt. CAMAT PRAMBON
KABUPATEN SIDOARJO**

FERI PRASETIYA BUDI, S.STP, M.HP
Pembina
NIP. 19790208 199810 1 001

